

# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

T A H U N   A N G G A R A N   2 0 2 4

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2024

## KATA PENGANTAR



Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan seluruh Satuan Kerja yang berada dibawah koordinasi Kementerian/Lembaga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan **Laporan Keuangan Audited BRPBATPP Tahunan TA 2024** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BRPBATPP. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 7 Mei 2025  
Kepala BRPBATPP Bogor,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi.,M.Si  
NIP. 197512162003122002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Ringkasan Laporan Keuangan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	3
II. Neraca .....	4
III. Laporan Operasional .....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
A. Penjelasan Umum .....	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis .....	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
A.3. Basis Akuntansi .....	13
A.4. Dasar Pengukuran .....	14
A.5. Kebijakan Akuntansi .....	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
B.1. Pendapatan Negara.....	22
B.2. Belanja Negara .....	24
B.3. Belanja Pegawai .....	25
B.4. Belanja Barang .....	26
B.5. Belanja Modal .....	27
B.5.1. Belanja Modal Tanah .....	28
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	28
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	29
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	29
B.5.5. Belanja Modal Lainnya .....	30
B.5.6. Belanja Bantuan Sosial .....	30
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca .....	31
C.1. Aset Lancar .....	31
C.2. Kas di Bendahara Pengeluaran .....	31
C.3. Kas di Bendahara Penerimaan .....	31
C.4. Kas Lainnya dan Setara Kas .....	32
C.5. Piutang Bukan Pajak .....	32
C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR .....	32
C.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran .....	33

C.8	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.....	33
C.9	Belanja dibayar di Muka.....	34
C.10	Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	34
C.11	Persediaan.....	35
C.12	Aset Tetap.....	36
C.13	Tanah.....	36
C.14	Peralatan dan Mesin.....	37
C.15	Gedung dan Bangunan.....	38
C.16	Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	39
C.17	Aset Tetap Lainnya.....	39
C.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	40
C.19	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	40
C.20	Piutang Jangka Panjang.....	40
C.21	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR.....	41
C.22	Tagihan Penjualan Angsuran.....	41
C.23	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang.....	41
C.24	Aset Lainnya.....	42
C.25	Aset Tak Berwujud.....	42
C.26	Dana yang Dibatasi Penggunaannya.....	43
C.27	Akumulasi Penyusutan dan Amortisi Aset Lainnya.....	43
C.28	Kewajiban Jangka Pendek.....	44
C.29	Uang Muka dari KPPN.....	44
C.30	Utang Kepada Pihak Ketiga.....	44
C.31	Pendapatan Diterima di Muka.....	45
C.32	Beban yang Masih Harus Dibayar.....	46
C.33	Ekuitas.....	46
D.	Penjelasan atas Pos-Pos laporan Operasional.....	47
D.1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	47
D.2	Beban Pegawai.....	47
D.3	Beban Persediaan.....	48
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	49
D.5	Beban Pemeliharaan.....	49
D.6	Beban Perjalanan Dinas.....	50
D.7	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	50
D.8	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	51
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	52

D.11 Kegiatan Non Operasioanal.....	52
D.12 Pos Luar Biasa.....	53
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
E.1 Ekuitas Awal.....	54
E.2 Surplus/Defisit LO.....	54
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	54
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset.....	54
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan.....	54
E.3.3 Selisih Reevaluasi Aset Tetap.....	55
E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	55
E.3.5 Koreksi Lain-Lain.....	55
E.4 Transaksi Antar Entitas.....	56
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain.....	56
E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	56
E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Langsung.....	57
E.5 Ekuitas Akhir.....	57
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	58
F.1 Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....	58
F.2 Penunjukkan PPK dan PPSPM.....	58
F.3 Penunjukkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.....	58
F.4 Pengungkapan Lain-lain.....	59
F.5 Rekapitulasi Permasalahan Hukum.....	59
VI. Lampiran.....	60



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129  
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890  
LAMAN <https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp>

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Audited Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited **Tahun Anggaran 2024** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 7 Mei 2025  
Kepala BRPBATPP Bogor,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi.,M.Si  
NIP. 197512162003122002

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Tahunan Audited **Tahun Anggaran 2024** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp153.182.570,00 atau mencapai 166% dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp92.050.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp91.637.206.090,00 atau mencapai 95% dari alokasi anggaran senilai Rp96.023.914.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan senilai Rp121.725.378.256,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp137.987.819,00; Piutang Jangka Panjang (neto) senilai Rp6.145.319,00; Aset Tetap (neto) senilai Rp121.273.665.098,00; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp313.725.339,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp282.968.490,00 dan Rp121.442.409.776,00. Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp121.725.378.256,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp131.678.900,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah senilai Rp93.469.296.275,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp93.337.617.375,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing senilai (Rp.41.037.037,00) dan senilai Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp93.378.654.412,00.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp123.198.994.269,00 dikurangi Defisit-LO senilai (Rp93.503.780.812,00) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp125.126.400,00, ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp91.622.069.909,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp121.442.409.766,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan dari Rekening Kas Negara.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (AUDITED)

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	92.050.000	153.182.570	166,41	300.170.860
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>92.050.000</b>	<b>153.182.570</b>	<b>166,41</b>	<b>300.170.860</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	78.014.965.000	77.996.946.652	99,98	32.711.092.372
Belanja Barang	B.4	18.008.949.000	13.640.259.438	75,74	18.140.124.656
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	321.376.850
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>96.023.914.000</b>	<b>91.637.206.090</b>	<b>95,43</b>	<b>51.172.593.878</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## II. NERACA

### BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

#### NERACA

**PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	6.176.200	6.643.400
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(30.881)	(30.792)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	6.145.319	6.612.608
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	131.842.500	150.146.830
Jumlah Aset Lancar		<b>137.987.819</b>	<b>156.759.438</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	95.685.186.000	95.685.186.000
Peralatan dan Mesin	C.15	34.785.253.831	35.263.889.243
Gedung dan Bangunan	C.16	42.390.789.500	42.431.883.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	2.052.244.320	2.052.244.320
Aset Tetap Lainnya	C.18	275.652.000	275.652.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(53.915.460.553)	(53.066.574.738)
Jumlah Aset Tetap		<b>121.273.665.098</b>	<b>122.642.280.325</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	126.467.500	1.068.989.400
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	165.188.000	13.449.347
Aset Lain-lain	C.22	1.178.336.366	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.156.266.527)	(549.599.559)
Jumlah Aset Lainnya		<b>313.725.339</b>	<b>532.839.188</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>121.725.378.256</b>	<b>123.331.878.951</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	227.020.990	76.937.182
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	55.947.500	55.947.500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>282.968.490</b>	<b>132.884.682</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>282.968.490</b>	<b>132.884.682</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	121.442.409.766	123.198.994.269
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>121.442.409.766</b>	<b>123.198.994.269</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>121.725.378.256</b>	<b>123.331.878.951</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023  
(AUDITED)**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	131.678.900	114.620.094
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>131.678.900</b>	<b>114.620.094</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	77.990.403.798	32.704.448.972
Beban Persediaan	D.3	318.490.630	263.273.502
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.600.516.535	12.943.971.447
Beban Pemeliharaan	D.5	2.050.973.171	2.898.945.810
Beban Perjalanan Dinas	D.6	687.178.587	2.074.168.790
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	124.876.400	56.433.330
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.696.887.946	2.083.338.840
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(30.792)	30.792
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>93.469.296.275</b>	<b>53.024.611.483</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(93.337.617.375)</b>	<b>(52.909.991.389)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.11	(180.626.172)	123.000.000
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12	-	(123.000.000)
Beban Pelepasan Aset	D.13	180.626.172	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	-	-
Defisit Selisih Kurs	D.15	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	14.462.735	95.349.933
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	14.462.735	95.447.433
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	(97.500)
Jumlah SURPLUS/DEFISIT Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	(166.163.437)	218.349.933
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(93.503.780.812)</b>	<b>(52.691.641.456)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(93.503.780.812)</b>	<b>(52.691.641.456)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023  
(AUDITED)**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	123.198.994.269	125.489.556.591
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(93.503.780.812)	(52.691.641.456)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	125.126.400	(17.743.645)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	125.126.400	(17.760.000)
LAIN-LAIN	E.3.6	-	16.355
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>		91.622.069.909	50.418.822.779
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.4	(1.756.584.503)	(2.290.562.322)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>121.442.409.766</b>	<b>123.198.994.269</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum dan  
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2020 dan diundangkan pada 30 Desember 2020.

BRPBATPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
- c. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi dan Misi KKP tertuang dalam Rencana Strategis KKP, dimana Visi dan Misi KKP selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah “**Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional**”, yang mana di dalamnya mengandung tiga pilar yang menjadi Misi KKP yaitu: **Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity)**.

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dimana di dalamnya tertuang visi dan misi yang menunjang dan selaras dengan visi dan misi KKP. Adapun visi dari BRPBATPP yaitu “**Mewujudkan Pengelolaan Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional**” dan misi BRPBATPP yaitu:

1. Meningkatkan riset yang inovatif dan implementatif melalui riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
2. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar melalui riset komprehensif untuk mencapai *center of excelent* dan *prime mover* budidaya air tawar;
3. Meningkatkan *Knowledge Base Management System* dalam mengaplikasikan hasil riset perikanan budidaya air tawar;
4. Mewujudkan *Research Extension Linkage* (REL) sebagai dasar kegiatan penyuluhan yang maju, kuat dan mandiri;
5. Mewujudkan tata kelola dan kerja sama dalam riset budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan secara efektif dan efisien.

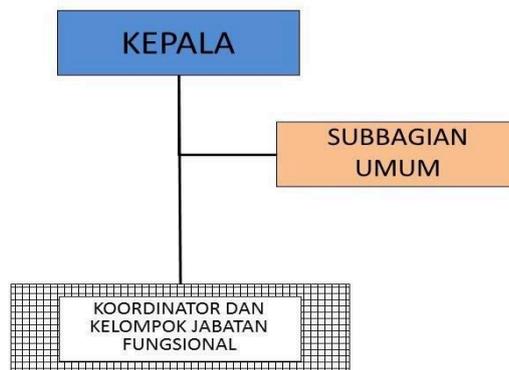
Keberadaan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sendiri juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BRSDM melalui kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sebagai berikut:

1. Meningkatkan riset yang inovatif dan implementatif melalui riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;

2. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
3. Meningkatkan Knowledge Base Management System dalam mengaplikasikan hasil riset perikanan budidaya air tawar;
4. Mewujudkan *Research Extension Linkage* (REL) sebagai dasar kegiatan penyuluhan yang maju, kuat dan mandiri;
5. Mewujudkan tata kelola dan kerja sama dalam riset perikanan secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan didukung oleh 438 pegawai yang terdiri dari:

No	Uraian	PNS	P3K	PPB	PPNPN	PJLP	Outshoring	Jumlah
1	Kantor BRPBATPP Sempur Bogor	27	-	-	8	6	6	47
2	Instalasi Riset Plasma Nutfah Budidaya Air Tawar Cijeruk	4	-	-	7	4	6	21
3	Instalasi Riset Lingkungan Perikanan dan Toksikologi Cibalagung	10	-	-	1	2	6	19
4	Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan Depok	1	-	-	1	3	6	11
5	Penyuluh Perikanan (34 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat)	138	86	103	-	-	-	327
<b>Total</b>		<b>180</b>	<b>86</b>	<b>103</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>425</b>

Bedasarkan Jabatan Fungsional dan Non Fungsional

No	Uraian	Jumlah Orang
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Subbagian Umum	1
3	Tugas Belajar	0
4	Penyuluhan Perikanan	223
5	Instruktur Pertama	1
6	Pustakawan	1
7	Perencana	3
8	Analisis Kepegawaian	4
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3
10	Pranata Keuangan	2
11	Pranata Humas	1
12	Pengelolaan PBJ	0
13	Arsiparis	2
14	JFU/Jabatan Fungsional Umum	24
15	PPNPN	17
16	Penyuluh Perikanan Bantu	180
<b>TOTAL</b>		<b>438</b>

## Pengukuran Kinerja

### Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### Sistem Informasi yang digunakan

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:



Gambar 2 Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Aplikasi RKA-KL, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Diharapkan dengan perubahan ini informasi yang melekat pada RKAKL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKAKL ke dalam aplikasi. Aplikasi ini kemudian dikembangkan dengan Pembuatan RKAKL Online mulai tahun 2016. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 2) Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- 3) Aplikasi SPSE, aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement - Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
- 4) Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- 5) SPAN, sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 6) Simponi, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNPB dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 7) SIMAN, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Audited **Tahun Anggaran 2024** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRPBATPP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada Tahun 2024, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Dengan penerapan SAKTI *full module* maka proses bisnis rekonsiliasi mulai Tahun 2022 perlu disesuaikan, yaitu Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

## A.3. Basis Akuntansi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audited **Tahun Anggaran 2024** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

##### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar****a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan senilai nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat senilai nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima rupiah);
  - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - 1) Tanah;
  - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moderen)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

##### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi Pagu APBN sebesar Rp96.023.914.000,00 dengan realisasi Rp91.637.206.090,00. Selama periode berjalan, BRPBATPP melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 13 kali dari DIPA awal. Sumber pendapatan dan jenis belanja per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	54.544.601.000	92.050.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>54.544.601.000</b>	<b>92.050.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	34.375.652.000	78.014.965.000
Belanja Barang	20.168.949.000	18.008.949.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>54.544.601.000</b>	<b>96.023.914.000</b>

Revisi DIPA sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dilakukan sebanyak 13 kali revisi, adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 dikarenakan adanya Pemutakhiran data POK.
2. Revisi kedua dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan adanya Revisi Blokir *Automatic Adjustment* (AA) senilai Rp3.992.825.000,00.
3. Revisi ketiga dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 dikarenakan adanya Revisi DJA terkait penambahan Pagu Belanja Pegawai Penyuluh yang dialihkan dari DIPA BPPP Tegal Senilai Rp38.914.313.000,00 sehingga DIPA yang semula Rp54.544.601.000,00 menjadi Rp93.458.914.000,00.
4. Revisi keempat dilakukan pada tanggal 3 April 2024 dikarenakan adanya Revisi Halaman III DIPA.
5. Revisi kelima dilakukan pada tanggal 2 Juni 2024 dikarenakan adanya Revisi halaman III DIPA.
6. Revisi keenam dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024 dikarenakan adanya Revisi Halaman III DIPA.
7. Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024 dikarenakan adanya Revisi Halaman III DIPA serta pengurangan kelompok masyarakat yang mendapatkan percontohan penyuluhan sehingga anggaranpun berkurang dan pengurangan anggaran beberapa kegiatan percontohan.

8. Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 18 September 2024 dikarenakan adanya Revisi Halaman III DIPA.
9. Revisi kesembilan dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2024 dikarenakan pemutakhiran POK, penyesuaian RPD Halaman III DIPA dan Pengadaan Seragam Penyuluh.
10. Revisi kesepuluh dilakukan pada tanggal 05 November 2024 dikarenakan adanya Penambahan Pagu Belanja Pegawai.
11. Revisi kesebelas dilakukan pada tanggal 29 November 2024 dikarenakan adanya Revisi Pemutakhiran data POK dan Revisi Halaman III DIPA.
12. Revisi kedua belas dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024 dikarenakan adanya Revisi Pemutakhiran data POK Belanja Pegawai.
13. Revisi ketiga belas dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 dikarenakan adanya Pemutakhiran Data POK – Pemenuhan minus UM PPPK

*Realisasi Pendapatan  
Rp153.182.570,00*

## **B.1 Pendapatan Negara**

Kebijakan Pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan kepada pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

Realisasi Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp153.182.570,00 atau mencapai 166 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp92.050.000,00.

Pendapatan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya. Tarif yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	598.500	100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	5.400.000	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	804.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	1.600.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	19.903.670	100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	78.125.000	124.876.400	159,84
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	6.425.000	0	0,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	7.500.000	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.050.000</b>	<b>153.182.570</b>	<b>166,41</b>

Realisasi Pendapatan PNBP Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami Penurunan 50,76% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp598.500,00 merupakan pendapatan dari Royalti Vaksin Ikan Satker BRPBATPP Sempur dengan estimasi pendapatan senilai Rp0,00;
2. Terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang peralatan dan mesin berupa 2 unit kendaraan roda 4 sebesar Rp123.000.000,00 pada tahun anggaran 2023 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 tidak diperoleh pendapatan tersebut.
3. Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi (425911) di tahun anggaran 2024 karena sudah tidak menjadi Tusi Balai sedangkan di tahun anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp34.857.000,00.
4. Terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) berupa sewa mesin ATM sebesar Rp55.957.500,00 pada tahun anggaran 2023 sedangkan di tahun anggaran 2024 tidak diperoleh pendapatan tersebut dikarenakan perjanjian sewa adalah tiga tahun yakni tahun 2023 sampai dengan 2024.

Walaupun demikian, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu semula Rp58.027.080,00 pada tahun 2023 naik di tahun 2024 menjadi Rp124.876.400,00.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Uraian	Realisasi		Nik / Turun (%)
	TA. 2024	TA. 2023	
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	598.500	275.625	217,14
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	5.400.000	3.000.000	180,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	804.000	57.546.000	1,40
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.600.000	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	19.903.670	23.465.155	84,82
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	124.876.400	58.027.080	215,20
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	0	34.857.000	0,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	123.000.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>153.182.570</b>	<b>300.170.860</b>	<b>195,96</b>

*Realisasi Belanja Negara  
Rp91.644.041.561,00*

## B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja pada Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp91.644.041.561,00 atau 99,58% dari anggaran belanja senilai Rp92.031.089.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Tahun Anggaran 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	78.014.965.000	77.996.946.652	99,98
Belanja Barang	18.008.949.000	13.640.259.438	75,74
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>96.023.914.000</b>	<b>91.637.206.090</b>	<b>95,43</b>
Pengembalian	0	185.705	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.023.914.000</b>	<b>91.637.020.385</b>	<b>95,43</b>

Realisasi Belanja Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami Penurunan senilai 79,07 % dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023. Pada belanja pegawai mengalami kenaikan disebabkan karena adanya penambahan belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK. Pada belanja barang mengalami penurunan terutama pada Belanja Perjalanan Dinas yang terkena blokir AA. Pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat Belanja Modal sehingga tidak ada realisasi Belanja Modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	77.996.946.652	32.711.092.372	138,44
Belanja Barang	13.640.259.438	18.140.124.656	-24,81
Belanja Modal	0	321.376.850	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>91.637.206.090</b>	<b>51.172.593.878</b>	<b>79,07</b>

*Belanja Pegawai  
Rp77.996.946.652,00*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp77.996.946.652,00 dan Rp32.711.092.375,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai 138,44% dari Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan penambahan belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sehingga mengalami kenaikan belanja pegawai pada periode 31 Desember 2024.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja pegawai pada 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan 31 Desember  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	19.507.514.400	10.143.856.500	92,31
Belanja Pembulatan Gaji PNS	274.274	147.690	85,71
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.506.117.450	763.175.610	97,35
Belanja Tunj. Anak PNS	467.936.742	226.826.228	106,30
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	11.340.000	122,22
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.873.438.000	2.075.590.000	86,62
Belanja Tunj. PPh PNS	256.185.862	67.163.574	281,44
Belanja Tunj. Beras PNS	1.061.966.880	575.594.160	84,50
Belanja Uang Makan PNS	3.119.042.000	1.659.647.000	87,93
Belanja Tunjangan Umum PNS	60.465.000	63.520.000	-4,81
Belanja Gaji Pokok PPPK	5.245.523.900	730.676.000	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	111.500	19.137	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	342.126.470	37.925.900	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	105.960.564	14.047.620	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	852.360.000	126.960.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	317.489.280	44.827.980	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	1.098.408.000	158.064.000	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	32.393.951.103	14.968.378.956	116,42
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	7.766.958.838	1.043.517.722	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>78.001.030.263</b>	<b>32.711.278.077</b>	100,00
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.083.611)	(185.705)	2.098,98
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>77.996.946.652</b>	<b>32.711.092.372</b>	<b>138,44</b>

*Belanja Barang*  
*Rp13.640.259.438,00*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp13.640.259.438,00 dan Rp18.140.124.656,00. Realisasi Belanja Barang Tahunan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 24,81% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belanja barang mengalami penurunan terutama pada Belanja Perjalanan Dinas yang terkena blokir AA.
2. Tidak adanya belanja modal di tahun anggaran 2024.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja barang pada Tahunan Audited Tahun Anggaran 2024 dengan 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

*Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1.060.963.022	2.469.093.269	-57,03
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	36.172.640	-100,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95.856.000	133.092.000	-27,98
Belanja Barang Operasional Lainnya	139.465.427	205.420.027	-32,11
Belanja Bahan	254.904.802	385.055.295	-33,80
Belanja Honor Output Kegiatan	3.768.000.000	5.860.540.557	-35,71
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.342.569.560	1.673.551.443	-19,78
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	11.830.100	74.802.575	-84,18
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	24.738.000	0	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	302.531.300	229.732.832	31,69
Belanja Langganan Listrik	825.289.902	738.565.745	11,74
Belanja Langganan Telepon	2.288.656	1.994.239	14,76
Belanja Langganan Air	21.331.250	10.379.200	105,52
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	119.704.525	117.423.525	1,94
Belanja Jasa Profesi	1.500.000	71.800.000	-97,91
Belanja Jasa Lainnya	2.936.481.996	1.159.386.709	153,28
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.321.207.045	1.616.544.538	-18,27
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563.669.376	688.532.186	-18,13
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	197.848.500	-100,00
Belanja Pemeliharaan Irigasi	163.501.750	396.020.586	-58,71
Belanja Perjalanan Biasa	683.078.587	2.035.768.790	-66,45
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000	18.900.000	-78,31
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	19.500.000	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>13.643.011.298</b>	<b>18.140.124.656</b>	<b>-24,79</b>
Pengembalian Belanja	(2.751.860)	-	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.640.259.438</b>	<b>18.140.124.656</b>	<b>-24,81</b>

*Belanja Modal Rp0,00*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp321.376.850,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahunan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Tahun Anggaran 2024.

Nilai perbandingan antara realisasi belanja modal pada Tahunan Tahun Anggaran 2024 dengan 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	301.285.850	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Irigasi	0	0	100,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>301.285.850</b>	<b>(100,00)</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

*Belanja Modal Tanah  
Rp.0,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan tanah untuk mendukung tugas dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp0,00*

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 Peralatan dan Mesin Tahunan Audited Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp301.285.850,00. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

untuk mendukung tugas dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pembelian	0	301.285.850	-100,00
Penyelesaian KDP	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>301.285.850</b>	<b>-100,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>301.285.850</b>	<b>-100,00</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0,00*

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pembelian	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Penyelesaian KDP	0	0	0,00
Pengembangan Nilai	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Bangunan Rp.0,00*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp20.091.000,00. Realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan belanja modal pada jalan, irigasi, dan jaringan untuk mendukung tugas dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Pada Tahun Anggaran 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Irigasi  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Pembelian	0	20.091.000	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal  
Lainnya Rp.0,00*

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2023 Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan belanja modal lainnya Pada Tahunan Tahun Anggaran 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Pembelian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0,00*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahunan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan belanja bantuan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Kelompok	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset lancar  
Rp137.987.819,00

### C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja BRPBATPP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp137.987.819,00 dan Rp156.759.438,00.

Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,00

### C.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
BP Kas (Tunai dan Bank)	0	0
Uang Muka Kerja/Voucher	0	0
BP UP	0	0
BP TUP	0	0
Kuitansi UP	0	0
Uang di Bank	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0,00

### C.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing senilai Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan  
Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	0	0
Uang di Bank	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0

#### C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp6.176.000,00

#### C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp6.176.200,00 dan Rp6.643.400,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya, Piutang Bukan Pajak senilai Rp6.176.200,00 merupakan pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2024 senilai Rp5.402.900,00 dan pengembalian uang makan PPPK bulan Desember 2024 senilai Rp773.300,00. Rincian Piutang PNBPN disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPN Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang Bukan Pajak	6.176.200	6.643.400
Piutang Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>6.176.200</b>	<b>6.643.400</b>

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0,00

#### C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
3	NIHIL	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Bagian Lancar TPA  
Rp0,00*

### **C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
3	NIHIL	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Bukan Pajak  
Rp30.881,00*

### **C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp(30.881),00 dan Rp(30.792,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikannya namun belum diselesaikan pembayarannya Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –  
Piutang Bukan Pajak Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan		50%	0
Macet		100%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan		50%	0
Macet		100%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

*Belanja Dibayar di Muka  
Rp55.947.500,00*

### **C.9 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp55.947.500,00 dan Rp55.947.500,00.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Rincian Belanja Dibayar di Muka Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Sewa Lahan Untuk Ruang Pengoperasian ATM BRI	55.947.500	55.947.500
		0
<b>Jumlah</b>	<b>55.947.500</b>	<b>55.947.500</b>

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Rp12.862.735,00*

### **C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp12.862.375,00 dan Rp20.194.103,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapata yang harus diterima senilai Rp12.862.375,00 berasal dari pengembalian tunjangan dan uang makan

pegawai. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan  
yang Masih Harus Diterima Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	12,862,735	20.194.103
NIHIL	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>12,862,735</b>	<b>20.194.103</b>

*Persediaan  
Rp131.842.500,00*

### C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah senilai Rp131.842.500,00 dan Rp150.146.830,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

*Rincian Persediaan Tahunan Tahun  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	15.443.000	14.159.600
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	495.000	0
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Bahan Baku	4.668.500	16.311.230
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0
Persediaan Lainnya	111.236.000	119.676.000
<b>Jumlah</b>	<b>131.842.500</b>	<b>150.146.830</b>

- a. Jenis persediaan berupa barang konsumsi sejumlah Rp15.443.600,00 terdiri dari Bahan Komputer;
- b. Jenis Suku Cadang berupa barang sejumlah Rp495.000,00 terdiri dari botol plastic alat laboratorium;
- c. Jenis persediaan bahan baku sejumlah Rp4 668.500,00 berupa bahan kimia padat dan bahan kimia cair
- d. Jenis persediaan lainnya sejumlah Rp111 236.000,00 terdiri dari berupa induk ikan, calon induk ikan, dan benih ikan. BRPBATPP terdapat perolehan lainnya sebesar Rp61.544.900,00 berupa benih dan ikan konsumsi.

**Hasil Opname Fisik (P01)**, Hasil Opname Fisik Kurang sebesar Rp7.130.000,00 merupakan persediaan lainnya ikan indukan yang sudah habis masa produksinya

*Aset Tetap*

*Rp121.273.665.098,00*

### **C.12 Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp121.273.665.098,00 dan Rp. 122.642.280.325,00.

Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan aset tetap lainnya.

*Tanah*

*Rp95.685.186.000,00*

### **C.13 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp95.685.186.000,00 dan Rp95.685.186.000,00. Rincian saldo berupa Tanah per 31 Desember 2024 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>95.685.186.000</b>
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>95.685.186.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

### Rincian Tanah Tahun Anggaran 2024

No.	KIB	Luas (m2)	Nilai (Rp.)	Alamat	Kondisi	No. Sertifikat
1	1	155	317.130.000	Pasir Jaya	Baik	NIB. 10.09.05.12.00444
2	1	4.215	8.843.070.000	Jl. Sempur No. 1, Bogor	Baik	NIB. 10.09.03.01.00065
3	2	11.975	43.328.331.000	Jl. Raya Banteng Suroso No. 6	Baik	NIB. 10.09.05.12.00090
4	1	8.814	10.620.870.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00219
5	1	9.950	12.064.375.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00160
6	2	5.280	6.283.200.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00233
7	3	2.260	2.683.750.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00010
8	4	937	1.105.660.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00121
9	5	4.570	5.484.000.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00133
10	6	4.129	4.954.800.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00132
<b>Total</b>		<b>52.285</b>	<b>95.685.186.000</b>			

Peralatan dan Mesin  
Rp34.785.253.831,00

### C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp34.785.253.831,00 dan Rp35.263.889.243,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	35.263.889.243
Mutasi tambah:	
Pembelian(101)	0
Transfer masuk (102)	361.568.751
Perolehan Lainnya (112)	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer keluar (302)	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	(840.204.166)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>34.785.253.828</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(33.410.287.125)
<b>Nilai Buku per 30 September 2023</b>	<b>1.374.966.703</b>

Rincian mutasi tambah dan kurang transaksi Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk (102) dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan berupa Lemari Besi/Metal 3 unit, dengan nilai Rp.11.700.000,00 dengan nomor BAST 6264/BPPSDM.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

2. Transfer Masuk (102) dari Pusat Penyuluhan berupa DCP (Alat Control) Sensor 2 unit, Skipjack Pole And Lines (Huhate) 2 unit, Modem 1 unit, dan Dissolvel Oxygen Meter (DO) 2 unit dengan nilai Rp.285.377.746,00 dengan nomor BAST 2382/BPPSDM.2/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
3. Transfer Masuk (102) dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berupa Blower 4 unit, A.C. Split 2 unit, Water Quality Analyzer System 1 unit, dan Loudspeaker 1 unit dengan nilai Rp.66.790.000,00 dengan nomor BAST B.4632/BRPBAPPP/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Rincian mutasi kurang transaksi Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan (401) berupa Alat Kantor 105 unit, Alat Rumah Tangga 209 unit, Alat Studio 5 unit, Alat Komunikasi 10 unit, Alat Kedokteran 1 unit, Unit Alat Laboratorium 249 unit, Komputer Unit 2 unit, dan Peralatan Komputer 10 unit dengan nilai Rp.840.204.166,00 dengan Nomor Berita Acara Inventarisasi BMN dalam rangka usulan penghapusan B.453/BRPBATPP/PL.110/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan B.1843/BRPBATPP/PL.750/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

*Gedung dan  
Bangunan*

*Rp42.390.789.500,00*

### **C.15 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp42.390.789.500,00 dan Rp42.431.883.500,00 Sedikit mengalami penurunan hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal terkait gedung dan bangunan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>35.263.889.243</b>
Mutasi tambah:	
Transfer masuk (102)	0
Reklasifikasi masuk (107)	161.153.000
Koreksi Nilai (205)	0
Pengembangan melalui KDP	0
Mutasi kurang:	0
Transfer keluar (302)	-
Reklasifikasi Keluar (304)	(161.153.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	(41.094.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>42.390.789.500</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(19.698.777.973)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>22.692.011.527</b>

Rincian mutasi tambah dan kurang transaksi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Masuk (107) Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 1 unit dengan nilai 161.153.000,00- dengan Surat Keterangan Koreksi Barang Milik Negara Nomor B.1724/BRPBATPP/PL.760//XII/2023 tanggal 9 Desember 2024.

Rincian mutasi kurang transaksi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Keluar (304) Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 unit dengan nilai 161.153.000,00- dengan Surat Keterangan Koreksi Barang Milik Negara Nomor B.1724/BRPBATPP/PL.760//XII/2023 tanggal 9 Desember 2024;
2. Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 1 unit dengan nilai (Rp.41.094.000,00) dengan BA. Inventarisasi B.1844/BRPBATPP/PL.750/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

*Jalan, Jaringan dan  
Irigasi  
Rp2.052.244.320,00*

### **C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp2.052.244.320,00 dan Rp2.052.244.320,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, rinciannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>2.052.244.320</b>
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk (102)	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.052.244.320</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(806.395.455)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>1.245.848.865</b>

*Aset Tetap Lainnya  
Rp275.652.000,00*

### **C.17 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp275.652.000,00 dan Rp275.652.000,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>275.652.000</b>
Mutasi tambah:	
- Transfer masuk (102)	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>275.652.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>275.652.000</b>

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00*

### C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp53.915.460.553,00*

### C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp53.915.460.553,00 dan Rp53.066.574.738,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	95.685.186.000	0	95.685.186.000
2	Peralatan dan Mesin	34.785.253.831	33.410.287.125	1.374.966.706
3	Gedung dan Bangunan	42.390.789.500	19.696.777.973	22.692.011.527
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.052.244.320	806.395.465	1.245.848.855
5	Aset Tetap Lainnya	275.652.000	0	275.652.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>175.189.125.651</b>	<b>53.913.460.563</b>	<b>121.273.665.088</b>

*Piutang Jangka Panjang Rp,00*

### C.20 Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Bogor merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Tagihan TP/TGR  
Rp0,00

### C.21 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### *Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0,00

### C.22 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Tagihan TPA Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
3	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0,00

### C.23 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–

Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –  
Piutang Jangka Panjang Tahun Anggaran 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

*Aset Lainnya  
Rp313.725.339,00*

#### **C.24 Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing senilai Rp313.725.339,00 dan Rp532.839.188,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya

*Aset Tak Berwujud  
Rp126.467.500,00*

#### **C.25 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing senilai Rp126.467.500,00 dan Rp1.068.989.400,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berupa Paten (Vaksin dan Probiotik) hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>1.068.989.400</b>
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk (102)	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar (302)	-274.918.000
Penghentian Aset dari Penggunaan (401)	-667.603.900
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>126.467.500</b>
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2024	(84.970.109)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>41.497.391</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud Tahunan  
Tahun Anggaran 2024*

Uraian	Nilai Perolehan
Vaksin Aeromonas hydrophila	93.057.500
Vaksin Koktail Aeromonas hydrophila - Streptococcus agalactiae	33.410.000
<b>Jumlah</b>	<b>126.467.500</b>

*Aset Lain-Lain*

*Rp165.188.000,00*

### C.26 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Aset lainnya berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp165.188.000,00 dan Rp13.449.347,00. Aset lainnya berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada satker BRPBAT merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga berupa pembayaran termin 31 Desember 2023 kontrak Jasa Pengadaan Outsourcing Satpam pada PT. Provinces Indonesia.

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya	165.188.000
<b>Mutasi kurang:</b>	
- koreksi	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>165.188.000</b>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>165.188.000</b>

*Akumulasi*

*Penyusutan dan*

*Amortisasi Aset*

*Lainnya*

*Rp1.156.266.527,00*

### C.27 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp1.156.266.527,00 dan Rp532.839.188,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin		(840.204.166)	
Gedung dan Bangunan		(41.094.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>(881.298.166)</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain		-274.968.361	
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>(1.156.266.527)</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban Jangka Pendek  
Rp282.968.490,00*

### C.28 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp282.968.490,00 dan Rp132.884.682,00.

Kewajiban jangka pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp227.020.990,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp55.947.500,00.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp0,00*

### C.29 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai dan Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau Rp0,00 dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp227.020.990,00*

### C.30 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp227.020.990,00 dan Rp76.937.182,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga berasal dari tagihan listrik bulan Desember 2024 senilai Rp61.514.190,00 dan tagihan air bulan Desember 2024 senilai Rp618.800,00 serta Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp165.188.000,00 yang berasal dari Penampungan dana melalui rekening penampungan akhir tahun (RPATA) Pengadaan Outsourcing Satpam pada PT. Provinces Indonesia.

*Pendapatan Diterima di Muka*

*Rp55.947.500,00*

### **C.31 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 senilai Rp55.947.500,00 dan pada 2023 senilai Rp55.947.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Dalam hal ini, pendapat tersebut berasal dari sewa tanah, gedung dan bangunan berupa ATM.

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 5.06 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 57.546.000,00 dengan Nomor 01/BRSDM-BRPBATPP/PKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan masa sewa 3 tahun periode sewa 22 Desember 2023 – 21 Desember 2026. Untuk pengakuan pendapatan dalam bulan Desember 2024 sebesar (Rp1.598.500,00) sehingga Pendapatan Sewa yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar **Rp55.947.500** (Rp57.546.000,00-Rp1.598.500,00).

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Utang Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024*

Uraian	Jumlah
Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (ATM)	55.947.500
<b>Total</b>	<b>55.947.500</b>

Jurnal penyesuaian khusus diatas merupakan jurnal pendapatan sewa diterima dimuka untuk semester II tahun 2023, merupakan pendapatan yang sudah diterima pemabayarannya yaitu berupa Sewa Lahan tanah seluas 5,06 m<sup>2</sup> yang terdiri diatas bedasarkan Sertifikat Hak Pakai untuk Ruang Pengoperasian ATM milik PT. BRI (Persero) Tbk selama 3 (Tiga) tahun senilai Rp. 57.546.000,00; nomor surat perjanjian sewa tanah 01/BRSDM-BRPBATPP/

PKS/XII/2023 selama 3 tahun mulai 22 Desember 2023 s.d 21 Desember 2026 dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 57.546.000/ 3 tahun = Rp. 19.182.000 / tahun. Sisa hak sewa yang belum diakui dalam laporan keuangan Semester II TA. 2023 sebesar Rp46.356.500,00.

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar  
Rp0,00*

### **C.32 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban  
yang Masih Harus Dibayar Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Ekuitas*

*Rp121.442.440.647,0  
0*

### **C.33 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp121.442.440.647,00 dan Rp123.198.994.269,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp131.678.900,00

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp131.678.900,00 dan Rp114.620.094,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	124.876.400	58.027.080	100,00
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	804.000	18.460.389	(95,64)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	5.400.000	3.000.000	100,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	0	34.857.000	100,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	0	(100,00)
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	598.500	275.625	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>131.678.900</b>	<b>114.620.094</b>	<b>14,88</b>

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan ikan nila, ikan tawar dan ikan mas. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan berasal dari sewa aula instalasi Cijeruk. Sedangkan Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana berasal dari sewa Gouse House. Sedangkan pendapatan royalti atas kekayaan intelektual berasal dari royalti kerjasama lisensi vaksin capprivac hydrogalaksi.

Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp598.500,00 merupakan pendapatan dari Royalti Vaksin Ikan Satker BRPBATPP Sempur dengan estimasi.

Beban Pegawai  
Rp77.990.403.798,00

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp77.990.403.798,00 dan Rp32.704.448.972,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	19.507.514.400	10.143.856.500	92,31
Beban Pembulatan Gaji PNS	264.279	147.119	79,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.505.234.915	763.175.610	97,23
Beban Tunj. Anak PNS	467.936.742	226.826.228	106,30
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	11.340.000	122,22
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.872.843.000	2.075.590.000	86,59
Beban Tunj. PPh PNS	256.185.862	67.163.574	281,44
Beban Tunj. Beras PNS	1.061.966.880	575.594.160	84,50
Beban Uang Makan PNS	3.114.151.115	1.659.162.000	87,69
Beban Tunj. Umum PNS	60.280.000	63.334.866	-4,82
Beban Gaji Pokok PPPK	5.243.455.100	730.676.000	617,62
Beban Pembulatan Gaji PPPK	111.500	19.137	482,64
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	342.023.030	37.925.900	801,82
Beban Tunj. Anak PPPK	105.919.188	14.047.620	654,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	851.280.000	126.960.000	570,51
Beban Tunj. Beras PPPK	317.489.280	44.827.980	608,24
Beban Uang Makan PPPK	1.097.638.566	158.064.000	594,43
Beban Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kine	32.393.951.103	14.968.378.956	116,42
Beban Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kine	7.766.958.838	1.043.517.722	644,31
<b>Jumlah</b>	<b>77.990.403.798</b>	<b>32.710.607.372</b>	<b>138,43</b>

*Beban Persediaan  
Rp443.367.030,00*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp443.367.030,00. dan Rp233.834.950,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	281.247.900	174.605.450	61,08
Beban Persediaan Bahan Baku	28.552.730	25.461.552	100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	8.690.000	63.206.500	0,00
Beban Persediaan Dijual/Diserahkan	124.876.400		
<b>Jumlah</b>	<b>443.367.030</b>	<b>263.273.502</b>	<b>68,41</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp10.600.516.535,0  
0*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp10.600.516.535,00 dan Rp12.943.971.447,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya peningkatan jumlah tenaga outsourcing yang dibebankan kepada kebutuhan operasional perkantoran dan meningkatnya belanja operasional penyuluhan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Keperluan Perkantoran	1.060.963.022	2.469.093.269	-57,0
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	36.172.640	-100,0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95.856.000	133.092.000	-28,0
Beban Barang Operasional Lainnya	139.465.427	205.420.027	-32,1
Beban Bahan	254.904.802	385.055.295	-33,8
Beban Honor Output Kegiatan	3.765.248.140	5.863.240.557	-35,8
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.342.569.560	1.673.551.443	-19,8
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11.830.100	74.802.575	100,0
Beban Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	24.738.000	0	100,0
Beban Langganan Listrik	825.385.857	743.033.168	11,1
Beban Langganan Telepon	2.288.656	1.994.239	14,8
Beban Langganan Air	19.580.450	12.606.000	55,3
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	119.704.525	117.423.525	1,9
Beban Jasa Profesi	1.500.000	69.100.000	-97,8
Beban Jasa Lainnya	2.936.481.996	1.159.386.709	153,3
<b>Jumlah</b>	<b>10.600.516.535</b>	<b>12.943.971.447</b>	<b>-18,10</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp2.050.973.790,00*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp2.050.973.790,00 dan Rp2.898.945.810,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan Beban Pemeliharaan disebabkan meningkatnya kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana dalam mendukung

kelancaran kegiatan perkantoran di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.321.207.045	1.616.544.538	(18,27)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563.669.376	688.532.186	(18,13)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	197.848.500	0,00
Beban Pemeliharaan Irigasi	163.501.750	396.020.586	
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	2.595.000	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.050.973.171</b>	<b>2.898.945.810</b>	<b>-29,25</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp683.078.587,00*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp683.078.587,00 dan Rp2.074.168.790,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya kegiatan tambahan di bidang Penyuluhan Perikanan berupa kegiatan percontohan dimasyarakat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023.*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	683.078.587	2.035.768.790	-66,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000	18.900.000	0,00
Beban Perjalanan Paket Meeting dalam Kota	0	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar K	0	19.500.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>687.178.587</b>	<b>2.074.168.790</b>	<b>-66,87</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
Rp124.876.400,00*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp124.876.400,00 dan Rp56.433.330,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada

masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Siserahkan Kepada Masyarakat	124.876.400	56.433.330	100,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>124.876.400</b>	<b>56.433.330</b>	<b>100,00</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp0,00*

### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.690.405.101,00*

### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp1.690.405.101,00 dan Rp1.228.711.147,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	744.832.204	743.959.432	0,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	855.283.094	427.641.543	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	16.849.701	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13.639.263	0	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	20.060.142	0	#DIV/0!
Beban Penyusutan Paten	0	27.137.667	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	26.660.142	13.122.604	103,16
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.660.474.845</b>	<b>1.228.710.947</b>	<b>35,14</b>
Beban Amortisasi Paten	29.930.256	0	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	0	0	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>29.930.256</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.690.405.101</b>	<b>1.228.710.947</b>	<b>37,58</b>

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0,00*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Defisit dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp139.589.135,00*

#### **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 Rp139.589.135,00 dan 2023 Rp218.349.933,00 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Tahunan  
Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	139.589.135	95.447.433	46,25
Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya	-	97.500	(100,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	123.000.000	100,00
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>139.589.135</b>	<b>218.544.933</b>	<b>-36,13</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa  
Rp0,00*

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp123.198.994.269,0*  
*0*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp123.198.994.269,00 dan Rp125.489.556.591,00.-.

*Defisit LO*  
*Rp93.503.780.812,00*

### E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp93.503.780.812,00 dan Rp52.691.641.456,00. Untuk nilai Defisit LO dengan Defisit LO Anaudited ini selisih (Rp.30.881,-) yaitu berupa penyisihan piutang tidak tertagih. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*  
*Rp125.126.400,00*

### E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp125.126.400,00 dan (Rp17.743.645,00).

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp0,00*

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00*

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp125.126.400,00

### E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp125.126.400,00 dan Rp(17.760.000,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan Pendapatan Perolehan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Pendapatam perolehan asset lainnya berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp124.876.400,00 dan Pendapatan Restok Ikan senilai Rp250.000,00.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	125.126.400
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(125.126.400)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Lain-Lain Rp0,00

### E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp0,00 dan Rp16.355,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Lain-Lain	-
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp91.622.069.909,00 dan Rp50.418.822.779,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

##### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-153.182.570
Ditagihkan ke Entitas Lain	91.637.206.090
Transfer Masuk	291.444.684
Transfer Keluar	-153.398.295
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>91.622.069.909</b>

##### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL senilai Rp(91.637.206.090,00) sedangkan DDEL senilai Rp153.182.570.00.

##### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp(291.444.684,00) dan 153.398.295,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Lain	Nilai
1	Transfer Masuk		(291.444.684)
2	Transfer Keluar		153.398.295

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. dari total Rp0,00 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL	NIHIL	Rp -
2	NIHIL	NIHIL	Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

*Ekuitas Akhir*  
*Rp121.442.409.776,00*

### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp121.442.409.766,00 dan Rp123.198.994.269,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: KEP.25/MEN-KP/KU.611/2022 tanggal 11 Maret 2023, Tentang perubahan ketiga puluh empat atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja kantor daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Plt. Kepala BRPBATPP  
Dr. Raden Roro Sri Pudji Dewi. S.Pi, M.Si

### **F.2. Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)**

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 1/BRSDM-BRPBATPP/KU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dn Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satker BRPBATPP Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Arif Budiman, S.Pi
- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)  
Umar As'ari, M.M

### **F.3. Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan**

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 2/BRSDM-BRPBATPP/KU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satker BRPBATPP Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran  
Sumarni, A.Md, BNT
- Bendahara Penerimaan  
Reny Rakhmawati, A.Md

#### F.4 Pengungkapan Lain-Lain

**Aset Tak Berwujud (ATB)**, senilai Rp126.467.500,00 pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berupa Paten (Vaksin dan Probiotik) hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Surat Kepala BPPSDMKP kepada Kepala Pusat dan Kepala Balai Nomor B.7011/BPPSDM.1/PL.710/XI/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Tindaklanjut Permohonan Alih Status BMN berupa Paten milik Satker BPPSDM kepada BRIN dinyatakan bahwa Paten yang akan disetujui untuk dialihstatuskan ke BRIN sebanyak 23 Paten dari 28 Paten. Masih terdapat NUP yang statusnya masih dalam proses untuk dimohonkan alih status kepada BRIN.

#### F.5 Rekapitulasi Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang terdapat di BRPBATPP adalah perbuatan melawan hukum Perkara Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penghuni rumah negara di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur Bogor.

Gugatan Rumah Dinas BRPBATPP di Cibalagung, Bogor, Jawa Barat. Para penghuni yang sudah pensiun tidak bersedia meninggalkan rumah dinas dan mengklaim rumah tersebut sudah menjadi milik pribadi.

Perkembangan sampai dengan saat ini adalah Tanggal 21 Desember 2021 telah dilaksanakan sidang ke 19 (proses persidangan masih berjalan).

#### F.6 Capaian Output

**Komponen Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan** bahwa pelaksanaan Capaian Output

sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 3.800 kelompok, telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan rincian KUB sejumlah 479 kelompok, Pokdakkan sejumlah 2.818 kelompok, Poklahsar sejumlah 460 kelompok, Kugar sejumlah 24 kelompok dan Pokmaswas sejumlah 19 kelompok.

Terdapat Komponen yang terdapat Blokir AA. Komponen tersebut yaitu **Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan**. Blokir AA kegiatan tersebut belum dapat di rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme revisi anggaran.

**Komponen Layanan BMN** sudah terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kegiatan BMN di akhir bulan Desember adalah mengusulkan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan dan mesin serta gedung dan Bangunan melalui aplikasi SIMAN V2.

**Komponen Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kegiatan tersebut yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi implementasi TTDE dan Portal Coofis secara daring yang diselenggarakan oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi serta melakukan pengisian matrik progress kerjasama lingkup BPPSDM Triwulan VI tahun 2024.

**Komponen Umum** yang terdiri dari kegiatan pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan pelatihan dan penyuluhan serta kegiatan pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan Riset Perikanan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

**Komponen Layanan Perkantoran** berupa operasional dan pemeliharaan kantor serta gaji dan tunjangan adalah sebagai berikut:

- **Operasional dan Pemeliharaan Kantor** bahwa telah Terbayarnya belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (belanja keperluan perkantoran, belanja barang operasional lainnya, belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja jasa lainnya), pembayaran layanan daya dan jasa (Listrik, telepon, PAM dan internet), pembayaran pemeliharaan kantor (belanja peralatan dan mesin-ekstrakomtable, persediaan barang konsumsi, pemeliharaan Gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan irigasi), dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor) bulan Desember tahun 2024.
- **Gaji dan Tunjangan** bahwa telah Terbayarnya belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS, Penyuluhan dan P3K bulan Desember tahun 2024.

**Komponen Layanan Manajemen SDM** merupakan Kegiatan Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yang bersifat manajerial;

**Komponen Layanan Perencanaan dan Penganggaran** merupakan Kegiatan Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal baik itu Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan maupun Internal Riset Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Selama tahun 2024 telah dilakukan revisi sebanyak 13 kali revisi yang terdiri dari 6 kali revisi Halaman III DIPA sekaligus Pemutakhiran Data POK (mandatory).

**Komponen Layanan Pemantauan dan Evaluasi** merupakan Kegiatan Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan telah selesai dilaksanakan

sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, mengikuti kegiatan Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja Level 3 Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan IV Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid yaitu daring melalui aplikasi zoom meeting dan luring di Ruang Rapat Pusat Penyuluhan KP, Lantai 4 Gedung BPPSDMKP 2, Jalan Pasir Putih II, Pademangan, Jakarta Utara pada tanggal 30-31 Desember 2024.

**Komponen Layanan Manajemen Keuangan** merupakan Kegiatan Pelayanan Keuangan Riset Perikanan sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan; Menatausahakan Pengajuan Gaji dan Tunjangan Kinerja, gaji lainnya (uang makan), dan tunjangan lainnya Minggu ke-5 bulan Desember 2024 lingkup BRPBATPP Bogor; Menatausahakan Uang Muka Kerja dan pertanggungjawaban kegiatan Minggu ke-5 bulan Desember 2024 lingkup BRPBATPP;



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 403829

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	DL	2375	QDD001	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	7,385,720,000	5,732,966,840	77.62	3,800	KelompokMasyarakat	458.00	3,717.06	12.03	3,800.0000	3,800.00	100.00	22.41	01	PN	Capaian Output dihitung secara kumulatif di akhir tahun		00 - Data Valid		03-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
2	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	DL	2375	QDD002	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	2,393,225,000	0	0.00	5	KelompokMasyarakat	5.00	-90.00	100.00	5.0000	5.00	100.00	100.00	04	PN	Blokir AA kegiatan tersebut belum dapat direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme revisi anggaran		00 - Data Valid		03-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
3	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBA956	Layanan BMN	23,000,000	21,823,000	94.88	3	Layanan	0.00	-97.00	0.00	3.0000	3.00	100.00	5.12	00	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		01-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
4	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	32,615,000	32,456,917	99.52	1	Layanan	0.00	-91.77	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.48	00	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		01-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
5	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBA962	Layanan Umum	260,940,000	158,682,823	60.81	1	Layanan	0.00	-97.85	0.00	1.0000	1.00	100.00	39.19	01	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		03-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
6	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBA994	Layanan Perkantoran	85,695,711,000	85,552,987,416	99.83	1	Layanan	0.00	-90.20	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.17	00	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		01-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
7	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBC954	Layanan Manajemen SDM	39,500,000	21,783,003	55.15	1	Layanan	0.00	-89.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	44.85	01	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		03-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
8	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50,000,000	47,769,132	95.54	1	Layanan	0.00	-93.10	0.00	1.0000	1.00	100.00	4.46	00	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		01-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

9	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	57,703,000	55,753,544	96.62	1	Layanan	0.00	-87.25	0.00	1.0000	1.00	100.00	3.38	00	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	01-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-
10	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	03212	12	WA	2378	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	85,500,000	19,818,886	23.18	1	Layanan	0.00	-95.01	0.00	1.0000	1.00	100.00	76.82	01	Non PN	progres capaian dihitung secara proposional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	03-JAN-25	03-JAN-25	Lihat catatan	-

d

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12  
**SATUAN KERJA** : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN 403829

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM  
Tgl Cetak : 07/05/25 8:16 PM  
Halaman : 1  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>92,050,000</b>	<b>153,182,570</b>	<b>61,132,570</b>	<b>166.41</b>	<b>91,933,000</b>	<b>300,170,860</b>	<b>208,237,860</b>	<b>326.51</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	92,050,000	153,182,570	61,132,570	166.41	91,933,000	300,170,860	208,237,860	326.51
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	<b>92,050,000</b>	<b>153,182,570</b>	<b>61,132,570</b>	<b>166.41</b>	<b>91,933,000</b>	<b>300,170,860</b>	<b>208,237,860</b>	<b>326.51</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	96,023,914,000	91,637,206,090	(4,386,707,910)	95.43	51,501,864,000	51,172,593,878	(329,270,122)	99.36
1. Belanja Pegawai	78,014,965,000	77,996,946,652	(18,018,348)	99.98	32,896,338,000	32,711,092,372	(185,245,628)	99.44
2. Belanja Barang	18,008,949,000	13,640,259,438	(4,368,689,562)	75.74	18,283,910,000	18,140,124,656	(143,785,344)	99.21
3. Belanja Modal	0	0	0	0	321,616,000	321,376,850	(239,150)	99.93
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12  
**SATUAN KERJA** : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN 403829

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM  
Tgl Cetak : 07/05/25 8:16 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>96,023,914,000</b>	<b>91,637,206,090</b>	<b>(4,386,707,910)</b>	<b>95.43</b>	<b>51,501,864,000</b>	<b>51,172,593,878</b>	<b>(329,270,122)</b>	<b>99.36</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 7 Mei 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi  
NIP 197512162003122002

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0200 ) JAWA BARAT  
**SATUAN KERJA** : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN  
**PENYULUHAN PERIKANAN**

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:18 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	131,678,900	114,620,094	17,058,806	14.883
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	131,678,900	114,620,094	17,058,806	14.883
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	131,678,900	114,620,094	17,058,806	14.883
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	77,990,403,798	32,704,448,972	45,285,954,826	138.47
Beban Persediaan	318,490,630	263,273,502	55,217,128	20.973
Beban Barang dan Jasa	10,600,516,535	12,943,971,447	(2,343,454,912)	(18.105)
Beban Pemeliharaan	2,050,973,171	2,898,945,810	(847,972,639)	(29.251)
Beban Perjalanan Dinas	687,178,587	2,074,168,790	(1,386,990,203)	(66.87)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	124,876,400	56,433,330	68,443,070	121.281

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0200 ) JAWA BARAT  
**SATUAN KERJA** : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:18 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,696,887,946	2,083,338,840	(386,450,894)	(18.55)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(30,792)	30,792	(61,584)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>93,469,296,275</b>	<b>53,024,611,483</b>	<b>40,444,684,792</b>	<b>76.275</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(93,337,617,375)</b>	<b>(52,909,991,389)</b>	<b>(40,427,625,986)</b>	<b>76.408</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(180,626,172)	123,000,000	(303,626,172)	(246.851)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	123,000,000	(123,000,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	180,626,172	0	180,626,172	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,462,735	95,349,933	(80,887,198)	(84.832)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,462,735	95,447,433	(80,984,698)	(84.847)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	97,500	(97,500)	(100)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(166,163,437)</b>	<b>218,349,933</b>	<b>(384,513,370)</b>	<b>(176.1)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(93,503,780,812)</b>	<b>(52,691,641,456)</b>	<b>(40,812,139,356)</b>	<b>77.455</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(93,503,780,812)</b>	<b>(52,691,641,456)</b>	<b>(40,812,139,356)</b>	<b>77.455</b>

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM  
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Cetak : 07/05/25 8:19 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	123,198,994,269	125,489,556,591	(2,290,562,322)	(1.83)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(93,503,780,812)	(52,691,641,456)	(40,812,139,356)	77.45
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	125,126,400	(17,743,645)	142,870,045	(805.19)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	125,126,400	(17,760,000)	142,886,400	(804.54)
LAIN-LAIN	0	16,355	(16,355)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	91,622,069,909	50,418,822,779	41,203,247,130	81.72
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,756,584,503)	(2,290,562,322)	533,977,819	(23.31)
EKUITAS AKHIR	121,442,409,766	123,198,994,269	(1,756,584,503)	(1.43)

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

Ditandatangani  
Secara Elektronik

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT**

**SATUAN KERJA : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:20 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	6,176,200	6,643,400	(467,200)	(7.03)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(30,881)	(30,792)	(89)	0.29
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>6,145,319</b>	<b>6,612,608</b>	<b>(467,289)</b>	<b>(7.07)</b>
Persediaan	131,842,500	150,146,830	(18,304,330)	(12.19)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>137,987,819</b>	<b>156,759,438</b>	<b>(18,771,619)</b>	<b>(11.97)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	95,685,186,000	95,685,186,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	34,785,253,831	35,263,889,243	(478,635,412)	(1.36)
Gedung dan Bangunan	42,390,789,500	42,431,883,500	(41,094,000)	(0.10)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,052,244,320	2,052,244,320	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	275,652,000	275,652,000	0	0.00
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(53,915,460,553)</b>	<b>(53,066,574,738)</b>	<b>(848,885,815)</b>	<b>1.60</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>121,273,665,098</b>	<b>122,642,280,325</b>	<b>(1,368,615,227)</b>	<b>(1.12)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	126,467,500	1,068,989,400	(942,521,900)	(88.17)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	165,188,000	13,449,347	151,738,653	1,128.22
Aset Lain-lain	1,178,336,366	0	1,178,336,366	0.00
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(1,156,266,527)</b>	<b>(549,599,559)</b>	<b>(606,666,968)</b>	<b>110.38</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>313,725,339</b>	<b>532,839,188</b>	<b>(219,113,849)</b>	<b>(41.12)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>121,725,378,256</b>	<b>123,331,878,951</b>	<b>(1,606,500,695)</b>	<b>(1.30)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	227,020,990	76,937,182	150,083,808	195.07
Pendapatan Diterima Dimuka	55,947,500	55,947,500	0	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>282,968,490</b>	<b>132,884,682</b>	<b>150,083,808</b>	<b>112.94</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>282,968,490</b>	<b>132,884,682</b>	<b>150,083,808</b>	<b>112.94</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	121,442,409,766	123,198,994,269	(1,756,584,503)	(1.43)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>121,442,409,766</b>	<b>123,198,994,269</b>	<b>(1,756,584,503)</b>	<b>(1.43)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>121,442,409,766</b>	<b>123,198,994,269</b>	<b>(1,756,584,503)</b>	<b>(1.43)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>121,725,378,256</b>	<b>123,331,878,951</b>	<b>(1,606,500,695)</b>	<b>(1.30)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM**  
**PENYULUHAN PERIKANAN Tgl Cetak : 07/05/25 8:20 PM**  
**Halaman : 2**

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA



**KPA**  
**Ditandatangani**  
**Secara Elektronik**

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM  
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Cetak : 07/05/25 8:19 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	6,176,200	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	30,881
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,443,000	0
0.0	117114	Suku Cadang	495,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	4,668,500	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	111,236,000	0
0.0	131111	Tanah	95,685,186,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	34,785,253,831	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	42,390,789,500	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	381,691,000	0
0.0	134112	Irigasi	662,585,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,007,968,320	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	275,652,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	33,410,287,125
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,698,777,973
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	275,169,859
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	191,336,092
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	339,889,504
0.0	162141	Paten	126,467,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	165,188,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	881,298,166	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	297,038,200	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	881,298,166
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	84,970,109
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	189,998,252
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	61,832,990
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	165,188,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	55,947,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	91,637,206,090
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	153,182,570	0
0.0	313211	Transfer Keluar	153,398,295	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	291,444,684
0.0	391111	Ekuitas	0	123,198,994,269
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	125,126,400
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	124,876,400
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	804,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	5,400,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:19 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	598,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,862,735
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,600,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,507,514,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	264,279	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,505,234,915	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	467,936,742	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,872,843,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	256,185,862	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,061,966,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,114,151,115	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	60,280,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5,243,455,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	111,500	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	342,023,030	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	105,919,188	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	851,280,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	317,489,280	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,097,638,566	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	32,393,951,103	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,766,958,838	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,060,963,022	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,856,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	139,465,427	0
3.0	521211	Beban Bahan	254,904,802	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,765,248,140	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,342,569,560	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,830,100	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,738,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	825,385,857	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,288,656	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	19,580,450	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	119,704,525	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,936,481,996	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,321,207,045	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563,669,376	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 403829 ) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:19 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	163,501,750	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	683,078,587	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,100,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	744,832,204	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	855,283,094	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13,639,263	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	20,060,142	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	26,245,208	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	29,930,256	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6,897,779	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	281,247,900	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	2,595,000	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	124,876,400	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	28,552,730	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	8,690,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	30,792
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	180,626,172	0
JUMLAH			270,753,670,321	270,753,670,321

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

Ditandatangani  
Secara Elektronik

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002